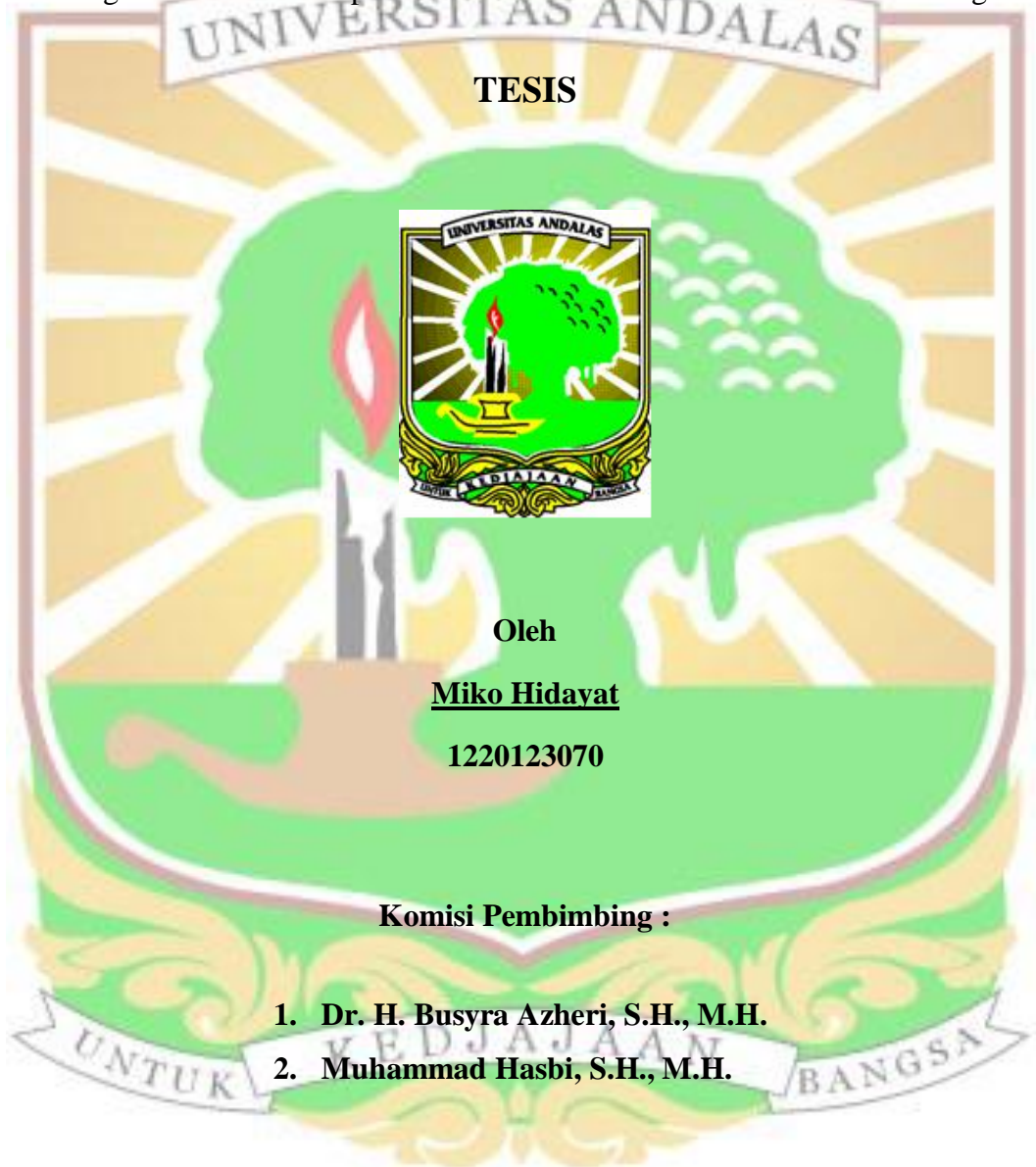


**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA
PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN
ANTARA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
DENGAN PT. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO)**

Guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang



TESIS

Oleh

Miko Hidayat

1220123070

Komisi Pembimbing :

- 1. Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.H.**
- 2. Muhammad Hasbi, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA
PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN
ANTARA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
DENGAN PT. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO)**

Miko Hidayat, NIM. 1220123070, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas
Hukum, Universitas Andalas Padang, 2017, 120 halaman

ABSTRAK

Konsep kemitraan selain menjadi salah satu program kerjasama antara perusahaan dengan koperasi, juga merupakan bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya. Perusahaan harus bertanggungjawab untuk mengembangkan usaha kecil dan masyarakat yang berada disekitarnya. Bentuk dukungan perusahaan khususnya perbankan, diantaranya PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat terhadap koperasi dan mitra binaan yang berada dibawah pembinaan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) berupa bantuan permodalan, pelatihan kepada pengurus maupun anggota koperasi agar kualitas sumber daya manusia meningkat, membantu dalam pengelolaan manajemen dan distribusi produk/jasa yang dihasilkan oleh koperasi. Hal ini telah dilakukan penelitian yang berpedoman pada rumusan masalah; bagaimana bentuk pengaturan perjanjian kerjasama penyaluran dana program kemitraan antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero), bagaimana tanggungjawab penyaluran dana program kemitraan antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) dan bagaimana hubungan hukum dengan Mitra Binaan dalam perjanjian kerjasama penyaluran dana program kemitraan antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero). Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data sekunder dan data primer dengan pemaparan hasil penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dalam usaha memberikan kepastian hukum kemitraan usaha tidak saja diatur dengan ada peraturan perundang-undangan tetapi para pihak diikat dalam suatu perjanjian kemitraan dengan berupaya untuk mengembangkan usaha kecil yang konsentrasi pada bidang perjasaaan yang merupakan tanggungjawab PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam pada itu itu hubungan hukum dengan Mitra Binaan dalam perjanjian kerjasama penyaluran dana program kemitraan, sekaligus merupakan binaan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sedangkan pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dalam hal ini hanya menyediakan pendanaan yang akan digunakan oleh PT. Jaminan sosial tenaga kerja tersebut, artinya hak dan kewajiban serta tanggungjawab pelaksanaan ada pada PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Kata Kunci : perjanjian kerjasama kemitraan dan dana program

**YURIDICAL ANALYSIS OF THE COOPERATION AGREEMENT
FOR CHANNELING OF PARTNERSHIP PROGRAM FUND BETWEEN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
WITH PT. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO)**

Miko Hidayat, NIM. 1220123070, Master Program of Postgraduate Notary of
Faculty of Law, Andalas University of Padang, 2017, 120 pages

UNIVERSITAS ANDALAS

ABSTRACT

The concept of partnership in addition to being one of the cooperation programs between companies and cooperatives, is also part of corporate social responsibility to the environment. The company must be responsible for developing small business and the community of customers / those around them. Forms of corporate support, especially banking, including PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat to cooperatives held under the guidance of PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja in the form of capital assistance, training to management and members of the cooperative in order to improve the quality of human resources, assisting in management management and distribution of products / services produced by the cooperative. This has been done research based on problem formulation; How the arrangement of cooperation arrangement of fund distribution of partnership program between PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat with PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero), how the responsibility of channeling funds partnership program between PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat with PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) and how the legal relationship with Partners in a partnership agreement pembasana funds program partnership between PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat with PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero). Problem approach used is normative juridical with secondary data source and primary data with exposure of descriptive research result. From the research result, it is found that in the business of providing legal certainty, business partnership is not only regulated by legislation but the parties are bound in a partnership agreement by striving to develop a small business that concentrates on the field of perjuah which is the responsibility of PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja. In the meantime, it is a legal relationship with Binaan Partners in the cooperation agreement of fund distribution of partnership program, as well as being the guidance of PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja, while the PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat in this case only provides funding to be used by PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja, meaning the rights and obligations as well as the responsibility of implementation is at PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Keywords: partnership partnership agreement and program fund